

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENUJU DEMOKRASI EKONOMI

Mubyarto

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Since the monetary and economic crisis in mid-1997 there has never been agreement, or serious debate, on how to measure economic recovery. Is it when foreign exchange rate can be stabilized or after banking recapitalization and business restructurization can be fully implemented? Even when economic growth has resumed mid-1999 and the beginning of 2000, some economist argued that it is still an artificial growth when investment has not recovered to the pre-crisis level.

The article proposes different view: that is, because of the important role the Ekonomi Rakyat (estimated about 50-60% of total Indonesian economy), the economic recovery has taken place, and the ekonomi rakyat has made adjustment to the changing situation relatively easily. The argument has been strengthened by our research findings in the regions (provinces, kabupaten, and villages) which shows much smaller rate of economic contraction in 1998. It is expected that regional autonomy to be implemented in the beginning of 2001 will speed up the process of the development of ekonomi rakyat and the realization of economic democracy in the regions and the country as a whole.

Keywords: *economic recovery, conglomeration, ekonomi rakyat, and regional autonomy.*

PENDAHULUAN

Pada waktu mengantar sebuah sarasehan di Yogyakarta, 18 Agustus 2000 dengan tema “Meluruskan Perjalanan Reformasi menuju Kejayaan Bangsa”, panitia menyatakan antara lain: 1) Ekonomi Nasional Indonesia dewasa ini telah hancur; 2) Pengangguran dan kemiskinan rakyat sangat meningkat; 3) Budaya lokal juga telah hancur.

Pada waktu itu kami berkomentar bahwa kekhawatiran yang berlebihan tentang krisis ekonomi bisa menyesatkan tidak saja pada orang awam, tetapi bahkan bagi kalangan ilmuwan di luar bidang ekonomi. Memang, jika kita ikuti berita-berita dalam media masa yang bersumber dari para pengamat ekonomi termasuk para anggota MPR/DPR dalam ST-2000 waktu itu, ekonomi nasional kita rupanya

dianggap telah “hancur total”, pengangguran merajalela, dan kemiskinan rakyat makin luas. Benarkah?

Bahwa krisis ekonomi telah amat menyusahkan banyak orang, dan rakyat kecil makin berat kehidupannya menghadapi kenaikan harga-harga umum memang benar. Tetapi yang menyesatkan adalah menggambarkan **ekonomi nasional kita telah benar-benar hancur total, dan sampai kini belum nampak adanya perbaikan sama sekali**. Apa ukuran untuk “hancur total dan belum ada perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional?” Kami khawatir ukuran untuk ini keliru atau menyesatkan, karena **ketidakstabilan politik** selalu dijadikan ukuran utama, termasuk di dalamnya pergolakan politik di daerah-daerah baik tantangan terhadap pemerintah pusat maupun

pertentangan antara kelompok-kelompok etnik di daerah sendiri. **Bias politik** ini telah jauh merambah analisis para ekonom sehingga pertumbuhan ekonomi positif yang 3-5% pun dianggap sebagai sekedar **pertumbuhan semu** karena **“hanya bersumber dari peningkatan konsumsi, bukan investasi”**. Karena pandangan yang bias politik dari para ekonom ini maka teori-teori ekonomi konvensional yang mereka anutpun dipilih hanya bagian-bagian yang mendukung argumentasi pesimistik sekaligus dengan sengaja melupakan bagian-bagian lain yang tidak mendukung dibuatnya kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Persepsi masyarakat tentang kehancuran ekonomi nasional dan belum nampak tanda-tanda pemulihan ini begitu kuat, sehingga makalah kami dalam sarasehan tersebut dengan judul “Analisis Ekonomi Tanpa Visi”, yang isinya **sangat meragukan** program **rekapitalisasi perbankan** sebagai satu-satunya solusi bagi pemulihan ekonomi Indonesia, malah dikutip wartawan yang meliputnya **sebagai solusi (Kedaulatan Rakyat, 20 Agustus)**. Bahkan lebih mencolok lagi berita tersebut yang diberi judul **“Untuk Pulihkan Ekonomi Indonesia: Solusinya Rekapitalisasi Perbankan”** dimuat pada hal 12, sedangkan pada halaman 1 terbitan koran yang sama dimuat berita menyesatkan yang bersumber dari seorang pakar asing berjudul **“Jeffrey Winters soal investasi: Sebenarnya Indonesia Dicuekin”**.

*No! Growth rate yang naik sedikit itu adalah karena meningkatnya konsumsi bukan karena investasi. Soal konsumsi ini, sebenarnya waktu Indonesia mulai krismon tahun 1997 masih ada **over capacity**. Daya konsumsi ini mungkin bersisa 10-12 bulan ke depan. Tapi kalau sesudah itu tidak ada juga investasi yang masuk, Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang kedua. Karena **tanpa investasi** dan produksi serta konsumsi, **ekonomi Indonesia tidak akan bisa jalan**. Impossible! Ekonomi Indonesia bisa dikatakan pulih kalau investasi sudah*

*mulai masuk dalam jumlah yang tinggi. Tapi faktanya sampai saat ini, baik investasi dalam maupun luar negeri belum ada yang masuk sama sekali. **Masih Nol**.*

Pernyataan Jeffrey Winters tersebut di samping “ketinggalan kereta” juga menyesatkan, dan yang lebih keliru lagi sangat meremehkan kinerja **ekonomi rakyat** (UKM) yang jelas-jelas sudah mengalami pemulihan. Jika Jeffrey Winters pada waktu itu sudi datang ke desa-desa dan daerah-daerah dan tidak sekedar membaca angka-angka statistik makroekonomi yang selalu ketinggalan, akan ditemui fakta-fakta berbeda. Yang benar adalah **ekonomi rakyat kita sudah pulih kembali** bahkan di banyak daerah di luar Jawa ekonomi rakyat tidak saja tidak pernah mengalami krisis tetapi malah “menikmatinya”. Di propinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Riau, beberapa kabupaten tidak pernah mencatat pertumbuhan ekonomi negatif pada puncak krisis tahun 1998. Dan di propinsi-propinsi ini investasi swasta sudah benar-benar berjalan kembali. Angka-angka investasi ini pada tingkat nasional pun sudah mulai mencatat angka positif meskipun belum kembali pada tingkatnya pada tahun 1997-1998.

Dalam pada itu sungguh keliru jika para pakar ekonomi bersitegang bahwa yang dimaksud ekonomi yang pulih adalah hanya jika **investasi sudah kembali normal seperti tingkatnya sebelum krisis** yaitu tingkatnya pada tahun 1997. Kekelirannya terletak pada anggapan bahwa angka-angka investasi resmi yang berasal dari kredit perbankan tersebut pasti terwujud dalam **investasi produktif (bukan spekulatif)**, dan meskipun secara **potensial produktif** belum tentu sama dengan **kebutuhan riil** masyarakat yaitu investasi yang hasil-hasilnya benar-benar dapat diserap pasar. Kami yakin bahwa di Indonesia telah terjadi kelebihan investasi (*over investment*) dalam cabang-cabang produksi tertentu, sehingga justru tidak bijaksana untuk mengarahkan nilai investasi agar mencapai

tingkat investasi yang sama yang pernah dicapai pada tahun 1997. Tingkat investasi tahun 1997 bisa merupakan tingkat yang **semu, tidak riil**, sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk dicapai kembali.

When a depositor place his or her money in a bank there may be some expectation that it will be used along with other money, in ways that would not involve undue risk and could be openly disclosed. This trust was often violated, which certainly needed changing.¹⁾

Kita tidak setuju pernyataan Jeffrey Winters bahwa “daya konsumsi mungkin bersisa 10-12 bulan lagi ke depan”. Apakah yang dimaksudkan selama **1-2 tahun sebelum krismon** ekonomi Indonesia telah mampu memproduksi **surplus** sehingga sekarang ekonomi kita yang **mandeg** hanya mengkonsumsi **surplus** (kelebihan) tersebut selama 10-12 bulan ke depan? Apakah benar ekonomi Indonesia sekarang **berhenti berproduksi** karena tidak ada investasi baru yang tercatat dalam perbankan? Inilah kekeliruan fatal sebuah asumsi bahwa **ekonomi rakyat tidak ada**, dan ekonomi nasional seakan-akan semuanya merupakan ekonomi yang dapat diukur secara makro-nasional. Yang benar adalah bagian besar ekonomi Indonesia (50-60%) adalah **ekonomi rakyat** (UKM) yang tidak seluruhnya terukur dalam angka-angka PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan kebutuhan konsumsi ekonomi rakyat dipenuhi oleh sektor ekonomi rakyat juga. Meskipun tidak tercatat dalam angka-angka investasi nasional yang oleh Jeffrey Winters dianggap **MASIH NOL**, tetapi kenyataannya ekonomi rakyat Indonesia masih terus berproduksi dan berinvestasi. Jika kita datang ke desa-desa dewasa ini kita lihat kegiatan ekonomi berjalan dengan intensitas yang tinggi. Demikian pula kegiatan produksi untuk memenuhi konsumsi lokal sudah berjalan normal tidak sekedar

mengkonsumsi surplus dari masa lalu, masa sebelum krismon.

EKONOMI INDONESIA TAHUN 2000 TUMBUH 5% LEBIH

BPS (Badan Pusat Statistik) pertengahan Nopember menyiarkan kabar gembira bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal III tahun 2000 mencapai angka “terhormat” 4,54%, dan dengan pertumbuhan yang tinggi ini untuk seluruh tahun 2000 pertumbuhan ekonomi diramalkan akan melampaui 5%. Pertumbuhan sektoral tertinggi adalah 3,86% untuk sektor pertanian, listrik-gas-air bersih 3,2%, industri pengolahan (manufaktur) 2,2%, hotel-restoran 2,02%, angkutan dan komunikasi 1,66%, pertambangan dan penggalian 1,3%, dan keuangan-persewaan-jasa perusahaan 1,06%. Satu-satunya sektor yang tumbuh negatif tetapi sangat kecil adalah sektor jasa-jasa yaitu – 0,02%.

Pengumuman kabar gembira ini mestinya disertai permintaan maaf karena pada bulan Mei lalu Badan yang sama secara resmi merevisi sasaran pertumbuhan ekonomi 4% untuk tahun 2000 menjadi hanya 1,6% dengan alasan non-ekonomi yaitu ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum, dan gangguan keamanan. Revisi menurun dari angka pertumbuhan ekonomi nasional ini membuat sejumlah pejabat pemerintah tidak senang, dan, meskipun tidak diakui terbuka, mengakibatkan kepala Badan Pusat Statistik dilengserkan.

Mengapa permintaan maaf ini sebaiknya disampaikan kepada masyarakat karena semua kekhawatiran adanya gangguan-gangguan non-ekonomi ini seperti disebutkan di atas sebenarnya tidak pernah hilang sejak bulan Mei. Kondisi sosial-politik, hukum, dan keamanan pada bulan-bulan Juli-September tidak pernah bertambah baik. Tokh sasaran pertumbuhan ekonomi 4% ternyata seharusnya tidak perlu direvisi ke bawah, bahkan terbukti akan terlampaui. Pelajaran baik yang perlu kita

¹⁾ Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford UP, 2000, p cit, p.185

perhatikan adalah, ketidakstabilan sosial-politik-keamanan bisa berpengaruh tetapi juga bisa tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Implikasi lain dari fenomena perbedaan pandangan dan persepsi tersebut di atas adalah bahwa di Indonesia peranan (sektor) **ekonomi rakyat** yang luwes dan tahan banting benar-benar sangat besar (sekitar 55%) sehingga dalam kenyataan sektor ekonomi rakyat ini mampu dengan mudah “menyesuaikan diri” dengan kondisi sosial-politik-keamanan yang berubah.²⁾ Krisis multi-dimensi yang memandegkan sektor ekonomi modern, ditanggapi dengan tepat oleh sektor ekonomi rakyat. Maka meskipun angka-angka indikator ekonomi makro semuanya tidak mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi tinggi, toh ekonomi rakyat bisa berkembang dengan baik sesuai situasi dan kondisi baru perekonomian.

Konsumsi Sebagai Pendorong Pertumbuhan. Pada bulan April dan Mei 2000 juga muncul versi lain dari perdebatan teoritis tentang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat pemerintah mulai menunjukkan optimisme karena pertumbuhan ekonomi yang mulai positif, para pengkritik dengan lantang berbicara tentang pertumbuhan ekonomi **semu** (*artificial*), karena menurut para pengkritik ini pertumbuhan baru berasal dari kenaikan **konsumsi**. Pertumbuhan ekonomi akan riil dan berkelanjutan hanya jika bersumber dari kenaikan **investasi**, bukan **konsumsi**.

Kami pada waktu itu tidak setuju dengan pendapat pesimistik dari para ekonom makro arus utama ini, bukan karena menurut saya pendapat mereka salah, tetapi sekali lagi karena mereka tanpa disadari meremehkan peranan **sektor ekonomi rakyat** yang telah mampu secara tepat menanggapi (merespon) kenaikan konsumsi masyarakat dengan inves-

tasi ekonomi rakyat juga. Investasi ekonomi rakyat adalah investasi kecil-kecilan di luar sektor perbankan yang luput dari catatan resmi investasi makro perbankan.

Kesimpulan kita, pertumbuhan ekonomi yang dirangsang **konsumsi masyarakat** tidak boleh diabaikan. Dan dalam perekonomian yang masih didominasi sektor ekonomi rakyat, kestabilan dan bahkan kenaikan konsumsi masyarakat (secara relatif maupun absolut) harus dianggap sebagai faktor penyelamat pertumbuhan ekonomi nasional. Kini telah terbukti bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp69,5 trilyun pada kuartal IV 1999, yang sudah mulai melampaui angka konsumsi rumah tangga tertinggi sebelum puncak krisis (Rp 69,2 trilyun pada kuartal I 1998), telah menjadi penyelamat ekonomi nasional. Pertumbuhan PDB Indonesia sudah mulai berbalik menjadi positif pada kuartal III 1999 (naik 1% dari 91,9 trilyun menjadi 92,8 trilyun). Pertumbuhan kuartalan ini terus meningkat berturut-turut menjadi 1,6%, 2,9%, dan 1% pada kuartal IV 1999, kuartal I 2000, kuartal II 2000. Ternyata BPS kini melaporkan kenaikan PDB 4,54% pada kuartal kuartal III 2000.

Krisis Ekonomi bukan Malapetaka. Adalah penerima Nobel Ekonomi Amartya Sen yang “mentertawakan” para ekonom makro yang meratapi krisis ekonomi Asia Timur termasuk Indonesia secara berlebihan seakan-akan sudah mengalami kiamat. Dalam bukunya *Development as Freedom*, Amartya Sen mengingatkan kemungkinan negara-negara yang terserang krisis ini untuk memanfaatkan tabungan tahunan sebelumnya untuk mempertahankan standar hidupnya. Kontraksi ekonomi 1 tahun harus dianggap “bukan apa-apa” jika negara yang bersangkutan telah mengakumulasi surplus hasil pertumbuhan ekonomi selama dua atau tiga dasawarsa sebelumnya.

Pandangan Amartya Sen ini ternyata diperkuat penemuan kami dari 22 propinsi di Indonesia yang secara rata-rata hanya mengalami kontraksi -6,05% pada tahun 1998,

²⁾ Taksiran 55% ini berdasar hasil survey BPS dan Pemda Kalimantan Timur, yaitu mereka yang berusaha sendiri atau berusaha dengan bantuan tenaga kerja keluarga.

kurang dari separo kontraksi ekonomi nasional -14% yang selama ini kita tunjuk sebagai angka kontraksi malapetaka. Angka kontraksi ini rata-rata di Jawa memang mencapai -13,40%, tetapi rata-rata di luar Jawa hanya -3,88%. Artinya tidak pada tempatnya kontraksi ekonomi di Jawa yang besar itu dianggap merupakan malapetaka bagi seluruh masyarakat dan daerah di Indonesia, sehingga sekarang terkesan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk menanggung beban yang amat berat (atau sangat mahal), untuk membayar biaya pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu berupa rekapitalisasi perbankan sekitar Rp 600 trilyun.

Krisis ekonomi ternyata lebih merupakan krisis sektor modern yang harus ditanggung terutama oleh sektor modern sendiri. Kini semakin banyak bukti bahwa krisis itu sendiri merupakan akibat ulah kebablasan dari para konglomerat yang serakah (*over-borrowing*).

Jelaslah bahwa kabar gembira pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan mencapai angka lebih dari 5% untuk tahun 2000 sebagaimana diumumkan BPS, yang bagi sejumlah ekonom makro mengejutkan, pasti tidak mengejutkan bagi mereka yang sudah lama mengakui peranan yang besar dari ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sejak awal krisis sudah dengan cepat mampu “menyiasatinya”, sehingga krisis ekonomi ini dianggap “bukan apa-apa”.

Bagi BPS yang juga pernah merasa sangat pesimis terhadap kondisi sosial-politik-keamanan negara dan bangsa Indonesia, hal ini merupakan pengalaman sangat berharga. Ternyata keandalan ekonomi rakyat mempunyai implikasi lain yang menarik yaitu apapun yang terjadi dan dilakukan para elit politik (di tingkat nasional maupun daerah) para pelaku ekonomi rakyat tidak akan “berhenti berekonomi”. **Berekonomi** (produksi, konsumsi, investasi) adalah gaya hidup (*way of life*) yang mereka lakukan dalam kondisi politik apapun. Memang mereka akan jauh lebih merasa senang dan tenteram apabila para elit politik

atau para pakar peduli dan berpihak pada mereka dan memikirkan nasib mereka. Tetapi seandainya tidakpun (para elit hanya memikirkan diri mereka sendiri), para pelaku ekonomi rakyat tidak akan mengeluh atau berunjuk rasa. Apapun yang akan terjadi, terjadilah!, Tuhan Maha Besar dan Maha Pemurah.

EKONOMI SIAPA YANG PERLU DIPULIHKAN?

Tugas nomor satu kabinet baru pasca ST-MPR tahun 2000 adalah “pemulihan ekonomi nasional yang telah hancur karena krisis ekonomi tiga tahun terakhir”. Karena pernyataan yang demikian dikeluarkan oleh hampir semua elit dan tokoh-tokoh nasional kita, dan disiarkan dengan gencar oleh media massa kita, maka tidak ada seorangpun yang berminat mempertanyakan kebenaran dan keakuratan pernyataan tersebut.

Adakah yang salah atau tidak akurat dalam pernyataan tersebut? Jawabnya, banyak sekali yang salah dan menyesatkan. Namun karena opini masyarakat telah terbentuk dan sulit digoyahkan, siapapun yang mempertanyakan termasuk ilmuwan, malahan akan “ditertawakan” atau paling untung pendapatnya akan dianggap sepi atau dianggap “ngawur”.

Bukti bahwa aspek **ekonomi** dianggap yang paling utama ditunjukkan oleh pernyataan bahwa “**tim ekonomi kabinet baru harus diterima pasar**”. Sejak kapan kita menganggap **pasar** lebih berkuasa dan lebih perlu didengar ketimbang **rakyat**? Adalah aneh bahwa dalam **sistem ekonomi kerakyatan** yang diamanatkan oleh MPR untuk dikembangkan pemerintah Gus Dur-Megawati, bukan **rakyat**, tetapi **pasar**, yang harus dijadikan kriteria suatu kabinet untuk dapat dianggap baik atau kurang baik. Atau dalam bahasa asing kabinet yang baik harus yang “*market friendly*”, bersahabat dengan pasar. Itulah semangat **globalisasi** yang rupanya telah menguasai perikehidupan bangsa Indonesia.

Dalam suasana globalisasi setiap negara terutama negara berkembang, telah menjadi “tawanan” para investor, para pemilik modal. Negara berkembang dianggap selalu tergantung pada investasi asing, sehingga untuk sekedar bisa bertahan saja, lebih-lebih untuk bisa bertumbuh, setiap pemerintah harus “diterima pasar”, yaitu bukan pasar riil, tempat orang jual beli barang-barang seperti pasar Beringharjo di kota Yogya, tetapi **pasar uang** dan **pasar modal**, tidak saja pasar **bursa efek Jakarta** (BEJ) yang baru dibom, tetapi juga pasar uang dan pasar modal **Singapura, New York, Tokyo**.³⁾

Sekarang kita bertanya, apakah benar **setiap** sektor ekonomi Indonesia telah **hancur total** karena krisis?; Tidak adakah kemungkinan sektor-sektor ekonomi, atau daerah-daerah tertentu di Indonesia tidak terkena krisis ekonomi atau yang bahkan mendapat manfaat dari krisis ekonomi?; Jika seandainya jawabannya **ya** atas pertanyaan tersebut, apakah tidak ada kemungkinan program dan kebijakan **pemulihan ekonomi** yang diusulkan malahan akan lebih menolong “penjahat-penjahat ekonomi”, yang justru telah menyumbang pada terjadinya krisis ekonomi kita?; Akhirnya jika jawaban atas pertanyaan ke **dua** juga banyak yang positif (**ya**), kita perlu bertanya **mengapa kita tetap ngotot bahwa masalah ekonomi utama kita adalah masalah “pemulihan” ekonomi nasional?**

Di sinilah para pakar ekonomi akan terpeprang atas kenyataan pahit bahwa kita telah

terkuasai oleh sistem ekonomi kapitalis yang sudah mengglobal yang pelaku-pelaku utamanya “diwakili” oleh pengusaha-pengusaha konglomerat di ibu kota negara. Pengusaha-pengusaha konglomerat ini sejak krismon 1997 telah “koleps” karena utangnya dalam valuta asing sangat dan terlalu besar, sehingga harus masuk “rumah sakit” yang disebut BPPN. Banyak di antara mereka yang utangnya jauh melebihi aset yang dijadikan jaminan sehingga perlu dibantu melalui program pemulihan yang dikenal dengan nama **restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang, dan rekapitalisasi perbankan**.

Sejauh ini dianggap normal, masuk akal, menurut teori ekonomi rasional, dan tidak ada jalan lain, kecuali melaksanakan program-program tersebut, makin cepat makin baik, dan jika tertunda-tunda akan makin mahal. Kesepakatan kita dengan “dokter spesialis IMF” sebagaimana tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) yang berisi jadwal restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang-utang swasta, dan rekapitalisasi perbankan, sering harus tertunda karena memang amat mahal bagi keuangan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjadi amat miskin karena utang luar negeri pemerintah yang besar, mencapai USD 75,3 milyar pada kuartal I tahun 2000.

Demikian penelitian lebih seksama atas program-program pemulihan ekonomi akan menunjukkan adanya perangkap-perangkap yang mengancam, yaitu jangan-jangan pelaksanaan program tersebut akan berarti pemerintah justru menyelamatkan “penjahat-penjahat ekonomi” yang melalui **program BLBI** telah “merampok” uang rakyat.

Bahwa kekhawatiran ini sudah dirasakan seluruh masyarakat, bukan saja oleh pakar-pakar ekonomi perbankan, ditunjukkan oleh 2 tajuk rencana **Kompas** tanggal 16 Agustus dan 30 Agustus 2000 masing-masing dengan judul **“Haruskah Seluruh Rakyat Indonesia Membayar Utang Konglomerat?”** dan **“Apa yang Mencurigakan dalam Pemulihan**

³⁾ Dalam sebuah forum ilmiah di Bogor tgl 20 Nopember 2000 Prof Gustaf Papanek dari Boston University, menegaskan keperluan modal asing sangat besar (*massive inflow of capital*) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Pendapat ini jelas kami tolak karena modal domestik khususnya pada ekonomi rakyat sebenarnya sudah cukup kuat. Kekuatan modal ekonomi rakyat ini terbukti dari telah terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional 5% pada kuartal III/2000 pada saat perusahaan besar/konglomerat belum selesai di-restrukturisasi melalui program rekapitalisasi perbankan. Setelah terjadinya krisis ekonomi Indonesia harus berusaha mengurangi utang dan ketergantungan pada modal luar negeri bukan malah terus menambahnya.

Ekonomi Indonesia? Kedua tajuk ini dengan terang-terangan menunjuk pada dua kepentingan yang bertabrakan yaitu **rakyat** dan **konglomerat**.

Sekarang ini ada kemungkinan tindakan pemerintah menolong dan menyelamatkan dunia usaha malah membuat seluruh rakyat Indonesia dibebani kewajiban membayar utang dunia usaha. Sementara para pemilik usaha yang berutang besar malah tidak membayarnya. Bahkan sebaliknya bisa memiliki kembali sebagian atau seluruh usaha miliknya, karena ujung-ujungnya yang membayar utang mereka adalah seluruh rakyat Indonesia, yang tidak membuat utang dan tidak tahu apa-apa.

... yang berutang hanya beberapa orang tetapi yang harus membayar adalah seluruh bangsa Indonesia. Haruskah kita yang membayar? (Kompas, 16 Agustus 2000)

Tim ekonomi kabinet baru di bawah Menko Rizal Ramli, yang semula dianggap berpotensi “melawan pasar”, seminggu kemudian malah dijuluki “bersahabat dengan konglomerat” (*conglomerat friendly*), bagaimana mungkin? Inilah yang membuat rakyat was-was, jangan-jangan Menteri-Menteri Ekonomi setegas dan sekuat apapun, yang diharapkan mampu bersikap tegas kepada para konglomerat untuk mengembalikan pinjaman yang pernah diperolehnya, karena ekonomi Indonesia sudah “terpenjara” dalam sistem ekonomi kapitalis global, lalu tidak akan berdaya.

“jangan-jangan (nanti) ada kebijakan yang (akan) menguntungkan para konglomerat dan merugikan rakyat banyak”...

Usaha-usaha besar bukannya tidak mampu membayar utang-utang, tetapi tidak mau membayar sebesar utang mereka (Kompas, 30 Agustus 2000)

Konglomerat Jangan Dimusuhi? Kami pernah “dimarahi” wakil konglomerat dalam

forum diskusi terhormat (di Lemhannas) pada saat tidak setuju untuk bersikap bersahabat dengan konglomerat. Pada waktu itu kami terang-terangan menyatakan konglomerat Indonesia sudah habis (*finished*), sehingga tidak ada gunanya diajak bersahabat. Mereka adalah “Betara Kala”, yang serakah, harus dimusuhi, bahkan dibunuh jika masih ada tanda-tanda hidup kembali.

Terbukti dari analisis 2 tajuk **Kompas** tersebut, bahwa kini masyarakat sudah sadar tentang “keserakahan” dan bahkan “kejahatan” konglomerat Indonesia. Menyatakan bahwa konglomerat bersifat serakah dan jahat adalah tidak mungkin pada era Orde Baru karena konglomerat justru sangat dekat dengan penguasa bahkan merupakan kroni-kroninya. Mereka, konglomerat, tidak boleh dianggap berhadapan atau bertabrakan dengan **ekonomi rakyat** karena mereka juga merasa **sebagai rakyat**. Sebagai “rakyat”, mereka merasa **berhak** berbuat apa saja yang menguntungkan mereka, meskipun merugikan “rakyat” lainnya.

Sebenarnya 7 tahun lalu (1993) Bank Dunia Perwakilan Jakarta dalam laporan resminya sudah mengingatkan pemerintah (dan masyarakat) Indonesia akan bahaya dominasi konglomerat, tetapi sekali lagi karena konglomerat justru merupakan bagian dari kekuasaan, maka peringatan tersebut tidak pernah digubris.

A source of increasing concern in recent years has been the relatively high concentration of ownership and market power in the modern business sector in the hands of large business groups or conglomerates. The dominance of conglomerates raises issues of both equity (equal access to market opportunities) and efficiency (removal of business to competition).⁴⁾

Kini, 7 tahun kemudian, apa yang dikawatirkan telah terjadi. Konglomerat yang serakah telah terang-terangan dianggap

⁴⁾ World Bank, *Sustaining Development*, 1993, hal x.

masyarakat sebagai “**penjahat-penjahat ekonomi**” yang dianggap harus dihukum. Tetapi karena mereka, konglomerat, sudah menjadi satu dengan kekuatan kapitalis global, yang sebagai kekuatan ekonomi raksasa sudah mampu menjadikan ekonomi Indonesia sebagai “tawanannya” atau “sanderanya”, maka nampaknya kita tetap harus bersahabat dengan “penjahat-penjahat” itu. Tim ekonomi kabinet lama (Kwik Kian Gie-Bambang Sudibyo) yang berani berperang melawan “konglomerat jahat” ternyata harus mundur untuk memberi tempat dan kesempatan kepada tim ekonomi baru (Rizal Ramli dkk) yang meski dikenal “menantang pasar” tetapi malahan dikhawatirkan bisa berubah menjadi “*conglomerates friendly*”.

EKONOMI INDONESIA TERSANDERA KRISIS TOTAL

Jika menjelang berakhirnya Repelita I terjadi peristiwa “MALARI” (Malapetaka Januari), maka 6 bulan sebelum berakhirnya Repelita VI perekonomian Indonesia secara mengagetkan diserang “KRISMON” (Krisis Moneter) yang laksana badai menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Pertama-tama kurs rupiah anjlog terhadap dolar pada tanggal 21 Juli dari Rp 2.540 menjadi Rp 2.700 (-6%), kemudian nilai rupiah ini mencapai titik terendah yaitu Rp 17.000/US\$ pada tanggal 22 Januari 1998. Meskipun kurs dolar ini akhirnya mencapai kondisi stabil pada tingkat Rp 8.500/\$ sepanjang tahun 1999-2000, masyarakat masih tetap tidak paham apakah krisis ekonomi sudah boleh dikatakan teratasi sekarang setelah pertumbuhan ekonomi mulai mencatat angka positif pada tingkat 4-5%/tahun, ataukah ekonomi hanya bisa disebut pulih jika kurs dolar kembali mencapai tingkat Rp 5.000/\$.

Berita-berita yang simpang-siur tentang penalangan utang (*bail out*) para konglomerat oleh pemerintah yang sebagian tidak kecil ditanggung APBN, atau menjadi beban seluruh rakyat, jelas memberikan kesan ekonomi Indonesia seluruhnya sudah “tersandera”. Artinya kebijaksanaan apapun untuk memulihkan ekonomi Indonesia dewasa ini rupanya telah dalam posisi “serba salah”, atau “maju kena-mundur kena”. Utang para konglomerat yang begitu besar pada bank-bank pemerintah jelas telah memiskinkan negara, tetapi jika mereka, para konglomerat, tidak ditolong, maka “perekonomian nasional Indonesia akan mengalami kerugian lebih besar lagi”, atau “terancam macet total”. Inilah ancaman” dari apa yang kita pelajari dari “teori ekonomi” kita, yang telah “menyandera” tim ekonomi kabinet Gus Dur-Megawati. Bagi mereka yang tidak begitu saja menerima teori ekonomi konvensional Barat, alternatif masih tetap ada yaitu melepaskan diri dari penyan-deraan teori ekonomi neoklasik ortodoks dan menerapkan teori ekonomi kelembagaan yang mengacu pada ideologi Pancasila dasar negara, dengan pemihakan penuh pada ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat yang mempunyai daya tahan kuat atau tahan banting pada situasi kritis seperti sekarang, harus dijadikan andalan untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari kondisi krisis, bukan lagi mengandalkan konglomerat yang telah menghancurkan ekonomi nasional.

Dalam pada itu penelitian di daerah-daerah di seluruh Indonesia menunjukkan adanya perbedaan besar antara ekonomi makro nasional sebagaimana digambarkan dengan kurs dolar, IHSG, tingkat inflasi, dan investasi, dengan kegiatan ekonomi rakyat dan dunia usaha di daerah. Bahkan laju pertumbuhan PDRB propinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada tahun 1998, berkisar antara **sepertiga** dan **seperdua** angka kontraksi ekonomi nasional yang -14%.

Tabel 1: Kontraksi Ekonomi 1998, dan Pertumbuhan Rata-Rata Repelita VI Beberapa Propinsi di Indonesia.

Propinsi	%	Rata-Rata 1994-1998	Propinsi	%	Rata-Rata 1994-1998 (%)
Sumut	-10,90	4,48	Kalteng	-6,94	5,63
Sumbar	- 6,40	4,63	Kalsel	-5,90	4,48
Riau	-1,93	5,90	Kaltim	-1,81	7,18
Jambi	-5,91	6,01	Sulut	-2,37	6,15
Lampung	-6,91	5,50	Sulteng	-3,96	4,96
DKI	-17,49	2,92	Sulsel	-5,33	4,65
Jabar	-17,77	2,32	Sultra	-5,75	3,87
Jateng	-9,82	3,53	Bali	-4,04	5,07
DIY	-12,36	3,03	NTB	-2,83	5,17
Jatim	-9,55	3,83	NTT*	-3,14	5,22
Kalbar	-4,71	6,21	Irja	12,83	12,37

Sumber: *Bappeda Propinsi*

* *Taksiran rata-rata kabupaten/kota se-NTT*

Dari propinsi-propinsi di luar Jawa bisa ditemukan banyak kabupaten/kota yang tetap melaporkan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 1998 seperti Tabalong (+29%) dan Kotabaru (+7%) di Kalsel, atau Batam (+3%) dan Bengkalis (2%) di Riau. Propinsi Sulut mencatat pertumbuhan ekonomi positif (0,19%). Propinsi Jawa Tengah melaporkan kabupaten Brebes tidak mengalami kontraksi pada tahun 1998 yaitu tumbuh +2%. Terakhir kita terima laporan pertumbuhan ekonomi yang positif sangat tinggi (12,8%) di Irian Jaya sehingga berarti tidak ada krisis ekonomi di propinsi ini pada tahun 1998. Bagi daerah-daerah yang tidak tumbuh negatif pada puncak krisis (1998), berarti **ekonomi rakyat** tidak terkena krisis, sehingga bagi mereka sebenarnya tidak dikenal istilah pemulihan ekonomi, **pemulihan ekonomi siapa?**

Kini semua daerah di Indonesia sedang sibuk mempersiapkan diri melaksanakan **otonomi daerah** sesuai UU No. 22 dan No.25/1999, bahkan untuk Irian Jaya dan DI Aceh sedang dicari "rumus" yang dianggap "pas" dalam bentuk "otonomi khusus" seperti yang pernah ditawarkan (dan sudah disetujui) untuk bekas propinsi Timor Timur. Ini berarti akan ada perubahan **sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial & budaya** di

daerah-daerah di seluruh Indonesia⁵⁾. Selanjutnya sistem penyelenggaraan kehidupan masyarakat akan lebih **demokratis** dan **adil** yaitu **sistem ekonomi kerakyatan**. Dalam **sistem ekonomi kerakyatan** sebagaimana diperintahkan oleh TAP MPR 1998 maupun TAP MPR 1999-2004, terkandung tekad untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan **Pancasila** yang dalam kehidupan ekonomi berarti dipatuhinya aturan-aturan main yang **moralistik, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial**. Inilah **Sistem ekonomi Pancasila** yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Krisis ekonomi mengandung **hikmah** yaitu disadarinya keperluan untuk menerapkan **sistem ekonomi nasional** yang sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia yaitu **Pancasila** dasar negara.

OTONOMI DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH: KASUS PROPINSI "SUPER-MAJEMUK" SUMATERA UTARA

Sejarah ekonomi masyarakat **Sumatera Utara** (Sumut) yang pernah dikenal sebagai

⁵⁾ Sistem tidak lain adalah "aturan main" yang disusun sendiri oleh masyarakat atau kelompok-kelompok kecil masyarakat di daerah-daerah.

wilayah Sumatera Timur menggambarkan persaingan dan kadang-kadang pertentangan antaretnik, antarsuku, dan antarbangsa yang sengit. Adalah pemerintah dan penanam modal Belanda yang pada pertengahan abad ke 19 meletakkan bibit-bibit persaingan kepentingan ekonomi, antara penduduk asli yang didominasi suku Melayu dengan para pemodal Belanda yang datang dengan mengembangkan berbagai tanaman perdagangan seperti tembakau, karet, dan kelapa sawit. Perkebunan-perkebunan besar ini yang membutuhkan banyak tenaga kerja, tidak dapat dikembangkan tanpa mendatangkan tenaga kerja dari luar, pada awalnya orang Cina dari Malaya jajahan Inggris, dan kemudian orang-orang Jawa khususnya Jawa Tengah. Penduduk asli Sumatera Timur yang tidak tertarik sebagai buruh perkebunan menjadi kelompok “ketiga” meskipun kelak menempati kedudukan sebagai kelompok tukang dan mandor yang berada di tengah-tengah antara pengusaha-pengusaha pemilik perkebunan besar dengan buruh-buruh dari Cina dan Jawa. Karl Pelzer pernah menunjukkan jumlah penduduk pendatang Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) yang pada tahun 1930 jauh melebihi penduduk asli (tabel 2).

Tabel 2: Penduduk Sumatera Timur Menurut Etnik, 1930

Etnik	Jumlah (ribu orang)	Persen
Melayu	225	15,0
Jawa	641	42,8
Karo Batak	134	9,0
Simalungun Batak	95	6,3
Toba Batak	73	4,9
Mandailing	34	2,3
Lain-lain Indonesia	109	7,3
Cina	158	10,5
Eropa	11	0,7
Lain-lain	18	1,2
Total	1498	100,0

Sumber: Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant*, 1978, hal 63.

Kini 130 tahun kemudian kondisi perekonomian masyarakat yang dualistik dan timpang sangat mencolok baik di kota Medan dengan penduduk 2,0 juta maupun di perdesaan seperti kabupaten Deli-Serdang dengan penduduk 1,9 juta orang. Salah satu indikator kuantitatif sangat nyata dari ketimpangan ekonomi adalah perbedaan mencolok nilai penghimpunan dana (pihak ketiga) pada perbankan di Sumut sebagai berikut:

Tabel 3: Posisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Kredit yang Disalurkan Kabupaten/Kodya Se-Sumatera Utara Agustus 2000 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Giro	Simpanan	Tabungan	Jumlah (D)	Kredit (K)	K/D (%)
1	Karo	29,20	63,75	235,84	328,79	124,75	37,9
2	Binjai/Langkat	38,39	149,16	265,79	453,34	115,75	25,2
3	Tebing Tinggi	43,77	576,77	296,42	916,96	100,55	11,0
4	Medan	3517,48	9936,39	7344,68	20798,55	6862,70	33,0
5	Dairi/Derli Serdang	6,71	10,74	19,57	37,02	35,17	95,0
6	P. Siantar/ Simalungun	182,67	423,23	614,81	1220,74	274,40	22,5
7	Tanjung Balai	48,62	93,83	268,56	411,01	29,57	7,2
8	Kotif. Kesaran/Asahan	66,23	597,07	293,65	956,95	149,76	15,6
9	Rantau Prapat& Labuhan Batu	88,62	187,99	323,23	599,84	231,36	38,6
10	Sibolga/Tapanuli Tengah	29,33	68,10	169,21	266,64	80,39	30,1
11	Tapanuli Utara	12,14	30,00	111,03	153,17	89,74	58,6
12	Toba Samosir	26,23	45,63	49,88	121,74	20,95	17,2
13	Nias	21,70	59,76	76,89	241,74	55,05	22,8
14	Tap. selatan/Mandailing Natal	55,02	31,09	189,63	275,74	117,80	42,7
Jumlah		4166,12	12.273,51	10.259,19	26698,82	8287,91	31,0

Sumber: BI Propinsi Sumut

Terlihat dari tabel 2 bahwa kota Medan dengan penduduk hanya 18% dari seluruh penduduk propinsi Sumatera Utara menghimpun dana sebesar 77,9% dari seluruhnya. Ketimpangan ini lebih mencolok lagi pada angka pemberian kredit yaitu 82,8% hanya untuk kota Medan saja. Konsentrasi kegiatan ekonomi di kota Medan ini melebihi angka konsentrasi ekonomi propinsi-propinsi lain di Indonesia termasuk Balikpapan di Kaltim, dan Surabaya untuk Jatim.

Akibat dari ketimpangan ekonomi yang demikian ekstrim tidak dapat dibantah lagi yaitu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam antarpenduduk dan antar kelompok-kelompok ekonomi di propinsi Sumut. Ketimpangan ekonomi ini sudah lama terjadi antara wilayah Sumut bagian timur yang sangat maju dan makmur dengan wilayah pantai barat yang sangat tertinggal dan miskin. Kini terbukti perdesaan seperti Kab. Deli Serdang juga jauh tertinggal dibanding wilayah-wilayah perkotaannya.

Program IDT di Sumut. Secara nasional penanggulangan kemiskinan *ala* program IDT memang kurang berhasil di propinsi Sumut. Menurut dampak ekonomi hanya berhasil 44,6% sehingga secara nasional propinsi ini menempati urutan 22 dan no.2 terburuk di 8 Propinsi Sumatera⁶⁾. Fakta ini terasa lebih menyakitkan lagi karena propinsi ini tercatat berpenduduk paling banyak dan paling kaya dengan PDRB total pada tahun 1998 mencapai Rp 48,3 trilyun atau 24,7% dari PDRB seluruh Sumatera. Dalam per kapita PDRB Sumut mencapai Rp 4,17 juta, tertinggi no.3 di Sumatera (tabel 4).

Artinya propinsi Sumatera Utara relatif kaya dan kuat ekonominya. Ini diperkuat lagi dengan jumlah PAD tahun 1998 sebesar Rp 204,57 milyar, yang terbesar di Sumatera dan merupakan 38,5% dari total PAD se-Sumatera. Kemampuan Sumut untuk mengumpulkan PAD yang lebih dari proporsi ini mengandung arti efisiensi kerja yang tinggi dari Pemerintah Daerah. Tetapi bahwa angka kemiskinan propinsi Sumut masih tinggi (16,74%), no.5 terbesar di Sumatera, menunjukkan belum efektifnya Pemda Sumut menggarap program-program penanggulangan kemiskinan. Kunjungan singkat di 2 desa di kabupaten Tanjung Morawa (28 Nopember 2000) mengungkapkan sejumlah kenyataan menarik.

Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin. Desa Tumpatan berpenduduk 4.000 orang (800 KK) mampu mengumpulkan PADes Rp 40 juta sehingga Pemda mampu menyusun dan melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduknya. Kepala Desanya Moh. Yusuf yang tidak tamat SLTA, dan pernah 12 tahun menjadi tukang becak, kini menjadi pengusaha ternak ayam yang sangat berhasil dengan pendapatan bersih lebih dari Rp 100.000 setiap 3-4 hari. Desa ini ditunjuk Dinas PMD Tanjung Morawa sebagai desa yang gagal melaksanakan program IDT karena tidak ada dana IDT yang bergulir, artinya semua pinjaman Pokmas IDT tidak ada yang dikembalikan.

Namun dari ketua Pokmas **Suwanto**, 41 tahun yang **Pujakesuma** (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) diperoleh kesan sangat baik. Suwanto sendiri yang sudah lupa nama Pokmasnya (Karya Maju), ternyata sangat berhasil memanfaatkan dana IDT sebagai pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 750.000 untuk membangun warung nasi permanen. Omsetnya kini mencapai Rp 300.000 per hari dengan keuntungan bersih Rp 50.000 (16-20%).

⁶⁾ Cukup memprihatinkan memang bahwa secara keseluruhan propinsi-propinsi di Sumatera hanya memperoleh dampak ekonomi rendah dari program IDT (rata-rata hanya 50,2%), lebih buruk dibanding Sulawesi (76,1%), Nusa Tenggara (74,4%), dan Jawa (76,9%). Angka-angka ini adalah hasil survei BPS Oktober 1997 dan telah dimuat dalam lampiran Pidato Pertanggung-jawaban Presiden RI 1 Maret 1998.

Tabel 4: Indikator Sosial-Ekonomi di Sumatera 1998

Propinsi	Luas Wilayah (000 km)	Penduduk	PDRB Perkapita (juta Rp)	PAD (milyar Rp)	Persen Penduduk Miskin	Rasio K/D % (Ag. 2000)
D.I. Aceh	55,4	4.010.099	6,19	48,68	14,75	37,7
Sumut	70,8	11.566.023	4,17	204,57	16,74	30,2
Sumbar	49,8	4.473.250	4,01	56,96	13,24	50,6
Riau	94,6	4.113.557	10,23	94,11	14,00	60,2
Jambi	44,8	2.490.925	2,64	31,59	26,64	40,0
Sumsel	103,7	7.497.438	4,32	1,01	23,53	30,2
Bengkulu	21,2	1.488.640	2,26	19,12	19,79	50,9
Lampung	33,3	6.894.437	2,80	74,69	29,11	37,9
Total	473,6	42.534.369	4,58	530,73	19,72	36,4

Sumber: Warta Ekonomi No.28/XII/27 Nop 2000. yang dihimpun

K: Kredit yang disalurkan, D: Dana Masyarakat

Dari seluruhnya 16 anggota Pokmas kini 5 orang anggota dianggap sudah berhasil/bebas dari kemiskinan. Mereka itu “pengusaha” kecil kedai nasi, warung sampah, 2 pemulung (tukang butut) dan jual beli pakaian bekas. Suwanto merasa bersyukur dan berterima kasih pada program IDT sehingga semua 3 anaknya bisa menyelesaikan pendidikan SLTA padahal Ia sendiri hanya tamat SD.

Desa Medan Sinembah kecamatan Tanjung Morawa. Desa ke dua yang diklasifikasikan sebagai desa berhasil dalam melaksanakan program IDT ternyata justru terbalik karena tidak saja dana IDT tidak bergulir tetapi menurut ketua Pokmas Merpati (Kaslan 50 th) tidak ada anggotanya yang kesejahteraannya meningkat. Bahkan 4 anggota yang sudah melunasi pinjamannya pun (Samin Karjo, Sakban, Sajuni, dan Tani Purba) tidak merasakan manfaat dana IDT. Seluruh anggota Pokmas Merpati (26 orang) adalah perajin sapu ijuk yang keuntungan usahanya sangat kecil, bahkan seringkali rugi karena dipermainkan/ditipu pedagang yang menjualkan hasil produksinya. Semua anggota mengeluh karena sangat lemah daya tawarnya menghadapi para pedagang meskipun pedagang-pedagang ini sebagian besar warga desa Medan Sinembah juga. Pada saat ditanyakan mengapa

tidak bersatu dalam bentuk koperasi, jawaban yang diberikan cepat sekali adalah bahwa koperasi pun tidak mampu menghadapi para pedagang karena penjualan melalui koperasi malah lebih seret pembayarannya.

Jelaslah di sini bahwa **pemasaran** merupakan masalah serius yang dihadapi para perajin karena para perajin ini dalam kedudukan tereksplotasi pedagang yang lebih kuat, dan Pemda setempat tidak menunjukkan tanda-tanda pemihakan pada mereka. Program IDT sendiri yang seharusnya dapat membuka peluang pemihakan ini melalui program pendampingan ternyata tidak berjalan. Kepala Desa **Akhmad Syis** (56 th) yang sudah menjabat kepala desa 27 tahun ternyata nampak tidak peduli terhadap program IDT dan tidak tahu menahu tentang program pendampingan yang seharusnya menjadi tugasnya. Padahal program IDT menyediakan dan BOP (Biaya Operasional Pemantauan) khusus Rp 600.000 untuk setiap desa, Rp 500.000 per desa di tingkat kecamatan, Rp 100.000 per desa di tingkat kabupaten dan Rp 20.000 per desa di tingkat propinsi.

Desa yang kurang beruntung ini dengan penduduk 3356 orang memiliki APPKD Rp 25,9 juta pada TA 1999/2000 dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

Gotong Royong	Rp 2,4 juta
Iuran Masyarakat	Rp 19,0 juta
Leges Surat-Surat	Rp 2,1 juta
Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	Rp 1,3 juta
Bantuan Pembangunan Desa	Rp 10,0 juta
	Rp 25,8 juta

Kesimpulan kita tidak dapat lain bahwa propinsi **Sumut** menghadapi masalah sangat serius dalam program-program pembangunannya. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sangat serius ini rupanya kurang disadari baik oleh Pemda maupun masyarakat sendiri sehingga seperti “api dalam sekam”. Perekonomian secara keseluruhan sudah sangat mengglobal dan berbagai komoditi perkebunannya sudah selama 130 tahun memasuki pasar global. Namun disayangkan bahwa kemajuan dan globalisasi ini hanya menyangkut **komoditinya** saja bukan **manusia** yang menghasilkannya. Dalam proses perkembangan yang demikian terjadilah ketimpangan antara kelompok masyarakat yang masih terus **tereksploitasi** dengan sejumlah orang yang selalu mampu **mengeksploitasi**. Proses eksploitasi antarkelompok ini tidak terpatahkan dan bahkan berkelanjutan karena kemajemukan **etnik** masyarakat **Sumut** yang termasuk “luar biasa” (super-majemuk) terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang saling bersaing.

Untuk memperlunak kesengitan persaingan antar kepentingan-kepentingan ekonomi, Pemda Sumut dan Pemda kabupaten/kota se Sumatera Utara perlu meningkatkan kepedulian dan komitmen untuk membantu pengembangan ekonomi rakyatnya. **Desentralisasi dan otonomi daerah** yang segera akan dilaksanakan tahun 2001 diharapkan mampu menggugah masyarakat mengubah paradigma kehidupannya.

PENUTUP

Ekonomi Indonesia pada tahun 2001 menghadapi berbagai masalah serius dalam masa transisi dari **era konglomerasi** menuju **era ekonomi kerakyatan**. Paradigma baru ekonomi kerakyatan akan menjadi kenyataan tanpa disadari karena **ekonomi rakyat** akan secara nyata makin besar peranannya.

People do not accept new paradigms through arguments and reason; the switch is made through experiencing the new phenomenon; it is made all at once or not at all. ⁷⁾

Sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan paradigma baru kehidupan ekonomi bangsa Indonesia akan mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yaitu “produksi dikerjakan **oleh semua, untuk semua**, di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat; kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang”. Demokrasi ekonomi Indonesia adalah kata lain dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagaimana tercantum sebagai sila ke-4 Pancasila ideologi negara.

Joan Robinson dalam bukunya *Economic Philosophy* (1962) menegaskan bahwa **ilmu**

⁷⁾ Lihat Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE 2000, hal 263 yang diulas dalam JEBI nomor ini.

ekonomi (*economics*) jika di dalam lebih lanjut terdiri atas 3 komponen dasar yaitu: ⁸⁾

- 1) *a set of rules;*
- 2) *an ideology to justify them; dan*
- 3) *a conscience in the individual which makes him strive to carry them out.*

Tahun 2001 adalah juga merupakan awal dilaksanakannya **otonomi daerah** berdasar UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah tidak lain adalah pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan di daerah-daerah, sehingga setiap anggota masyarakat di daerah berperan serta secara aktif dalam seluruh kegiatan produksi atas barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan jika anggota-anggota masyarakat itu masih lemah dan berdaya tawar rendah, maka mereka akan menyadari perlunya bergabung dalam organisasi **koperasi**.

*...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.*⁹⁾

Demikian kasus kehidupan ekonomi di propinsi Sumatera Utara yang diamati pada dua desa **Tumpatan** dan **Medan Sinembah** kabupaten Deli Serdang, meyakinkan kita akan keperluan melaksanakan **sistem ekonomi kerakyatan** yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat pada tingkatan yang paling bawah dari perekonomian Indonesia. Otonomi Daerah secara penuh dan bertanggung jawab diharapkan menjadi awal kehidupan ekonomi yang makmur dan berkeadilan.

Sebagai nasehat kepada para ekonom muda yang baru berkenalan dengan ilmu ekonomi (*economics* atau *political economy*), Alfred Marshall yang Bapak **teori ekonomi Neoklasik** mengingatkan agar para ekonom tidak berlebihan dalam menggunakan ilmu matematika, karena yang harus diterangkan

dan dipelajarinya adalah kehidupan manusia sehari-hari yang mungkin sangat sederhana.

*Political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well being.*¹⁰⁾

*It is the business of economics as of almost every other science to collect facts, to arrange and interpret them and to draw inferences from them... induction and deduction are both needed for scientific thought as the right and left foot are both needed for walking.*¹¹⁾

Demikian sederhananya obyek kajian ilmu ekonomi sehingga kebanyakan tidak memerlukan matematika yang terlalu kompleks.

*The chief use of pure mathematics in economic questions seems to be in helping a person to write down quickly, shortly and exactly, some of his thoughts for his own use; and to make sure that he has enough, and only enough, premises for his conclusions (i.e. that his equations are neither more nor less in number than his unknowns). But when a great many symbols have to be used, they become very laborious to anyone but the writer himself.*¹²⁾

Masalah **ekonomi rakyat** dalam era otonomi daerah pada tahun-tahun mendatang memerlukan analisis dan kerja keras dari para ekonom yang **berpihak** pada mereka. Ekonomi Rakyat sekarang ini sudah pulih dari krisis ekonomi. Yang diperlukan selanjutnya adalah upaya untuk lebih memberdayakannya melalui program-program yang dapat dikembangkan mereka sendiri secara mandiri dan penuh percaya diri.

⁸⁾ Wilson, Rodney, *Economics, Ethics, and Religion*, Macmillan 1997, hal.5.

⁹⁾ penjelasan pasal 33 UUD 1945.

¹⁰⁾ Alfred Marshall, *Principles of Economics*, Macmillan 1948, hal.1.

¹¹⁾ Alfred Marshall, idem, hal 29.

¹²⁾ Alfred, Marshall, idem, hal x - xi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, H.W and Hal Hill, 1999, *Southeast Asia's Economic Crisis: Origin, Lessons, and the Way Forward*, ed.1, ISEAS, Singapore.
- Mann, R, 1998, *Economic Crisis in Indonesia: The Full Story*, Gateway Books, Penang.
- Marshall, A, 1948, *Principles of Economics*, Macmillan & Co, New York.
- Mcleod, R.H and R. Garnaut (ed.) 1998, *East Asia in Crisis; From Being a Miracle to Needing One?* Routledge, London.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, 2000, *Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur 1996-1999*, Samarinda.
- Sen, A, 2000, *Development As Freedom*, ed.1, Oxford UP, New Delhi.
- Wilson, R, 1997, *Economics, Ethics, and Religion*, Macmillan & Co, London.
- World Bank, 1993, *Sustaining Development*, World Bank, Jakarta.

Tabel 1. Perbandingan Kredit Yang Disalurkan dan Dana Masyarakat Yang Dihimpun Perbankan Propinsi se-Indonesia 1995-2000
(Milyar rupiah)

Propinsi	1995 *			1996 *			1997 *			1998 *			1999 *			Agustus 2000		
	K	D	K/D (%)	K	D	K/D (%)	K	D	K/D (%)	K	D	K/D (%)	K	D	K/D (%)	K	D	K/D (%)
DI Aceh	861	1012	85,1	1136	1367	83,1	1336	1791	74,6	1287	3248	39,6	1001	2464	40,6	112	2953	37,7
Sumut	7784	7851	99,1	9141	9735	93,9	10192	10460	97,4	11581	21342	54,3	7193	24267	29,6	8049	26650	30,2
Sumbar	1560	1551	100,6	1845	1945	94,9	2139	2149	99,5	2096	3967	52,8	1995	4059	49,2	2241	4429	50,6
Riau	3454	2280	151,5	3692	2792	132,2	5461	3753	145,5	6678	7290	91,6	5865	8174	71,8	5721	9500	60,2
Jambi	815	760	107,2	1042	934	111,6	1232	1087	113,3	1335	2109	63,3	1075	2268	47,4	1032	2577	40,0
Sumsel	2459	3201	76,8	2989	3990	74,9	4136	4495	92,0	4707	8837	53,3	2896	9263	31,3	2827	9347	30,2
Bengkulu	369	300	123,0	445	331	134,4	512	415	123,3	505	923	54,7	431	834	51,7	454	892	50,9
Lampung	2455	1381	177,8	3467	1661	208,9	4396	1868	235,3	7287	4025	181,0	1853	4122	45,0	1663	4393	37,9
DKI - Jkt	153652	135334	113,5	196355	182009	107,9	257970	240629	107,2	346748	351766	98,6	136587	399559	34,2	146901	383630	38,3
Jabar	17035	18326	93,0	20395	21860	93,3	25365	25845	98,1	28382	47694	59,5	18577	56801	32,7	20251	63156	32,1
Jateng	10391	8941	116,2	12162	11468	106,1	14092	13351	105,6	15693	25021	62,7	10675	28509	37,4	10977	31394	35,0
DIY	1074	1709	62,8	1294	2157	60,0	1541	2599	59,3	1447	4529	31,9	971	5421	17,9	1075	5861	18,3
Jatim	18705	17851	104,8	22167	23010	96,3	28779	27059	106,4	36350	51148	71,1	19473	59516	34,5	21304	62262	34,2
Bali	2183	2453	89,0	2629	3217	81,7	3341	3955	84,5	3318	8321	39,9	2528	9180	27,5	3060	9939	30,8
NTB	513	466	110,1	659	638	103,3	794	825	96,2	722	1597	45,2	604	1600	37,8	768	1695	45,3
NTT	271	533	50,8	328	664	49,4	413	764	54,1	462	1476	31,3	486	1870	26,0	575	2037	28,2
Kalbar	1856	1335	139,0	2123	1796	118,2	2657	2130	124,7	2880	3737	77,1	2005	4436	45,2	2084	4907	42,5
Kalteng	372	457	81,4	502	578	86,9	612	762	80,3	573	1329	43,1	503	1591	31,6	571	1800	31,7
Kalsel	1295	1000	129,5	1410	1268	111,2	1919	1529	125,5	2239	3018	74,2	1874	3316	56,5	2321	3806	61,0
Kaltim	1709	2210	77,3	1901	2715	70,0	2642	3398	77,8	3156	6027	53,4	1517	6948	21,8	1820	8090	22,5
Sulut	1116	925	120,6	1233	1211	101,8	1482	1264	117,2	1621	2439	66,5	1430	2829	50,5	1673	3363	49,7
Sulteng	369	438	84,2	454	563	80,6	577	673	85,7	571	1301	43,9	539	1349	40,0	591	1466	40,3
Sulsel	2309	2500	92,4	3055	3238	94,3	3633	3705	98,1	3717	7256	51,2	3383	7943	42,6	3428	8602	39,9
Sultra	239	243	98,4	300	333	90,1	355	399	89,0	328	759	43,2	283	842	33,6	366	959	38,2
Maluku	1046	714	146,5	1228	884	138,9	1124	1023	109,9	1993	1729	115,3	425	1674	25,4	365	1564	23,3
Irian	631	790	79,9	853	1051	81,2	1269	1315	96,5	1584	2160	73,3	956	2391	40,0	684	2775	24,6
Total	234523	214561	109,3	292805	281415	104,0	377969	357243	105,8	487260	573048	85,0	225125	651226	34,6	241913	658047	36,8

Sumber: Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia*, September 2000.

* Posisi akhir tahun

Tabel 2: Jumlah Kredit Yang Disalurkan dan Dana Yang Dihimpun dari Masyarakat di Indonesia 1995-2000

Tahun	K (Milyar Rp)	D (Milyar Rp)	K/D (%)
1995	234.611	214.764	109,2
1996	292.921	281.718	104,0
1997	378.134	357.613	105,7
1998	487.426	573.524	85,0
1999	225.133	651.370	34,6
2000 (Agustus)	241.913	658.047	36,8

Sumber: Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia*, September 2000.

Tabel 3: Perbandingan Jumlah Kredit Yang Disalurkan dan Dana Yang Dihimpun dari Masyarakat Propinsi Terkaya di Indonesia 1995 dan 2000.

Propinsi	K (Milyar Rp)		D (Milyar Rp)		K/D (%)	
	1995	2000	1995	2000	1995	2000
DI Aceh	861	112	1.012	2.953	85,1	37,7
Riau	3.454	5.721	2.280	9.500	151,5	60,2
Kaltim	1.709	1.820	2.210	8.090	77,3	22,5
Irian Jaya	631	684	790	2.775	79,9	24,6
DKI Jakarta	153.652	146.901	135.334	383.630	113,5	38,3

Sumber: idem

Tabel 4: Perbandingan Jumlah Kredit Yang Disalurkan dan Dana Yang Dihimpun dari Masyarakat Per-Wilayah di Indonesia 1995 dan 2000

Wilayah	K (Milyar Rp)				D (Milyar Rp)			
	1995	%	2000	%	1995	%	2000	%
Sumatera	19.757	8,4	23.099	9,5	18.336	8,5	60.741	9,3
Jawa-Bali	203.040	86,6	203.568	84,5	184.614	86	556.242	84,5
NTT,NTB, Maluku, Irian	2.461	1,0	2.392	1,0	2.503	1,2	8.071	1,2
Kalimantan	5.232	2,2	6.796	2,8	5.002	2,4	18.603	2,8
Sulawesi	4.033	1,7	6.058	2,5	4.106	1,9	14.390	2,2
Jumlah	234.523	100,0	241.913	100,0	214.561	100,0	658.047	100,0

Sumber: idem